

	News Title : Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Aset Kripto, Ini Tanggapan Kemendag	
	Media Name : Liputan6.com	Journalist : Agustina Melani
	Publish Date : 21 January 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Tirta Karma Sanjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan (Kemendag)), Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Crypto	Topic : kripto

Home > Crypto

Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Aset Kripto, Ini Tanggapan Kemendag



Agustina Melani

21 Jan 2022, 17:21 WIB



Share
14



Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat peluncuran T-Hub kedua di Bali pada Jumat (21/1/2022) (Foto: Tokocrypto)

Liputan6.com, Seminyak - Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat mengeluarkan fatwa haram untuk kripto, kini Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah menilai polemik mata uang **kripto** ini dapat dilihat dari dua sisi sebagai instrumen investasi dan alat tukar.

"Sebagai alat investasi, mata uang kripto ini memiliki banyak kekurangan, jika ditinjau dari syariat Islam," tulis PP **Muhammadiyah** dikutip dari keterangan resmi, dari Kanal Tekno Liputan6.com.

BACA JUGA:

Robinhood Luncurkan Dompot Kripto bagi 1.000 Pengguna

Misalnya, sifat spekulatif yang kentara karena mata uang kripto sangat fluktuatif dengan kenaikan atau penurunan nilai yang tidak wajar. Selain sifat spekulatif, mata uang kripto juga dinilai mengandung ketidakjelasan (gharar).

"**Bitcoin** hanyalah angka-angka tanpa adanya underlying asset--aset yang menjamin bitcoin, seperti emas dan barang berharga lain," tutur PP Muhammadiyah.

Kedua sifat spekulatif dan gharar tersebut diharamkan oleh syariat, dan tidak memenuhi nilai dan tolok ukur Etika Bisnis menurut Muhammadiyah, khususnya dua poin ini, yaitu: "Tidak boleh ada gharar (HR. Muslim) dan tidak boleh ada maisir (QS. Al Maidah: 90)."

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Perdagangan **Jerry Sambuaga** menuturkan, fatwa merupakan wewenang MUI dan Muhammadiyah. Pihaknya fokus untuk memastikan kripto itu aman.

"Silahkan mereka yang bisa melihat seperti apa. Kami fokus memastikan aset dan komoditas ini benar-benar dari semua sisi, aspek, semua aman. Ini dari sisi bagaimana kita *create* komoditas kripto sebagai aset yang bisa dipertanggungjawabkan," kata dia saat peluncuran T-Hub di Seminyak, Bali, Jumat (21/1/2022).

Buka Ruang Diskusi



Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Sanjaya (Foto: Tokocrypto)

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Sanjaya mengatakan, pihaknya akan membuka ruang diskusi dengan Muhammadiyah dengan fatwa haram terkait kripto itu.

Sebelumnya, Bappebti juga menindaklanjuti setelah keluarnya fatwa MUI terkait kripto haram. Ia menuturkan, aset kripto itu akan menjadi haram dijadikan alat transaksi karena melanggar UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

"Terkait hal lainnya MUI sendiri membuka ruang untuk berdiskusi, karena sampai saat ini belum ada fatwa aset kripto itu sendiri haram. Untuk selanjutnya terkait Muhammadiyah kami pun siap untuk buka ruang berdiskusi, termasuk ada ahli fiqih," kata dia.

COO Tokocrypto Teguh Hermenda mengatakan, pihaknya menghormati fatwa tersebut. Pihaknya terus melakukan edukasi dan pelaku pasar juga makin dewasa. Hal ini seiring pertumbuhan volume transaksi stabil.

"Volume lebih stabil, tak berubah signifikan. Kami akan terus berkoordinasi dan meyakinkan aset kripto diperlakukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan," kata dia.